



821 RTSM Berhak Terima BLT Bersyarat

JOGJA -- Sebanyak 821 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kota Jogja berhak atas Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersyarat yang ditujukan untuk mengangkat kesejahteraan RTSM tersebut. Mereka tersebar di lima kecamatan dari 14 kecamatan di Kota Jogja yang terjaring dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Jogja sebelumnya menerima surat edaran dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait BLT bersyarat tersebut.

"Awalnya sesuai surat edaran Kemensos jumlah RTSM yang disantuni sebanyak 913 yang tersebar di lima kecamatan lewat Program Keluarga Harapan (PKH)," ungkap Kasi Bantuan Sosial Dinsosakertrans Kota Jogja Dra Ari Purnamawati.

Setelah dilakukan validasi terhadap data yang diunduh dari BPS DIY, Dinsosakertrans Kota Jogja kemudian melakukan verifikasi dan validasi data di lima kecamatan yang diusulkan.

Dari hasil validasi RTSM di lima kecamatan yaitu Gedongtengen, Mantrijeron, Mergangsan, Umbulharjo dan Tegalrejo sebanyak 821 RTSM dinyatakan *eligible* alias berhak atas BLT bersyarat.

"Awalnya program PKH ini sudah ada sejak tahun 2008. Tapi saat kami setiap tahun mengajukan usulan bantuan untuk PKH ke Kemensos selalu ditolak. Barutahun 2011 ini kami menerima bantuan dari pemerintah pusat itu pun di triwulan terakhir," ujarnya.




>> KE HAL 7 Tri Maryatun Ari Purnamawati

Lima Kecamatan Penerima BLT Bersyarat

Kecamatan	Jumlah RTSM	Hasil Validasi
Tegalrejo	219	198
Umbulharjo	210	183
Gedongtengen	189	177
Mantrijeron	160	142
Mergangsan	135	121
TOTAL	913	821

821 RTSM Berhak Terima BLT Bersyarat

Sambungan dari halaman 1

Alasan yang dilontarkan Kemensos RI jumlah RTSM yang ada di setiap kecamatan tidak memenuhi persyaratan untuk pemberian bantuan PKH. Kemensos mensyaratkan setiap kecamatan yang terjaring program PKH minimal harus memiliki 250 RTSM. "Sedangkan saat ini yang tertinggi hanya Kecamatan Tegalrejo dengan 219 RTSM. Oleh karena itu sejak 2009 permohonan kita selalu ditolak," katanya.

Kesehatan dan pendidikan
 Staf Bantuan Sosial Dinsosakertrans, Supriyanto menerangkan skenario bantuan BLT bersyarat untuk RTSM yang terjaring dalam PKH terbagi menjadi dua.

Pertama, bantuan tetap sebesar Rp 200.000 per tahun. Kedua, bantuan bagi anggota RTSM (kesehatan dan pendidikan) seperti bantuan bagi ibu hamil/menyusui dan anak balita sebesar Rp 800.000, anak usia SD sebesar Rp 400.000 dan anak usia SMP sebesar Rp 800.000.

"Bantuan disalurkan selama empat kali setiap triwulan. Besarnya BLT bersyarat ini juga berbeda-beda setiap RTSM, tergantung berapa jumlah anggota keluarga yang disantuni dalam RTSM ini," sebutnya.

Supriyanto menjelaskan skenario pemberian bantuan ini diawasi secara ketat. Kemensos mengangkat satu pendamping di tiap kecamatan untuk mengawasi pemanfaatan bantuan.

"Pendamping difungsikan untuk melakukan pengawasan pemanfaatan bantuan. Kalau penyaluran BLT sendiri lewat rekening bank BRI," ujarnya.

Ari kemudian menimpali pengawasan pemanfaatan BLT bersyarat ini terbilang lebih ketat daripada pengawasan pemberian bantuan lainnya.

Ia menyontohkan jika dalam RTSM penerima BLT bersyarat terdapat anggota keluarga yang bersekolah maka harus diperiksa apakah kehadirannya di sekolah.

"Minimal persentasi kehadiran harus 80 persen lebih. Begitu juga jika ibu hamil atau menyusui yang rutin memeriksakan kesehatannya diteliti oleh pendamping apakah betul yang bersangkutan ke Puskesmas," jelasnya.

Di lain pihak Kabid Bantuan Sosial Dinsosakertrans Kota Jogja Dra Tri Maryatun kepada *Bernas Jogja*, Selasa (24/1), menjanjikan pemberian BLT bersyarat ini fungsinya tidak akan tumpah tindih (*overlap*) dengan program KMS yang digairkan Pemkot Jogja.

"Saya rasa tidak akan *overlap*. Kita anggap kedua program tersebut saling mengisi dan melengkapi. Saya tegaskan PKH ini ditujukan agar masyarakat (RTSM) mampu mengakses layanan kesehatan dan pendidikan," katanya. (c19)

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	No
1. Dinsosakertrans
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005